INKLUSI
Australia - Indonesia Partnership
Towards an Inclusive Society

SETARA
Institute for Democracy and Peace

RINGKASAN EKSEKUTIF

INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA(IISI) 2024

SETARA Institute, Jakarta, 2025

INDEKS
INKLUSI SOSIAL
INDONESIA (IISI)

1. LATAR BELAKANG

SETARA Institute adalah organisasi riset dan advokasi kebijakan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat dalam tata sosial politik demokratis. Untuk mewujudkan panduan pencapaian visi tersebut, salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute yang didukung oleh Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui program INKLUSI untuk mendorong agenda pembangunan inklusi sosial guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dengan melakukan pengukuran dan analisis terhadap kondisi inklusi sosial di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Selain untuk memahami kondisi inklusi sosial secara presisi, studi ini juga ditujukan untuk mendorong dan memperkokoh *research based policy making*, guna menghasilkan agenda-agenda pembangunan inklusif dan memastikan keterpenuhan proses dan hasil pembangunan bagi semua orang, sebagaimana prinsip *no one left behind*.

Tata kelola kehidupan yang inklusif menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045. Secara ideologis, inklusi sosial juga menjadi *ultimate goals* aktualisasi Pancasila, khususnya sila ke-5, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Prinsip ini menegaskan pentingnya menciptakan pembangunan yang inklusif, dimana setiap kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi,

dapat terlibat dan berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Secara teknokratis, inklusi sosial menjadi mantra pembangunan baik dalam RPJPN maupun dalam RPJMN 2025-2029 dan juga menjadi fokus dunia internasional melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sementara, secara aktual, urgensi agenda pembangunan inklusi sosial ditujukan untuk mengikis kesenjangan, mempercepat penikmatan hak bagi kelompok rentan, dan memandu pelibatan subjek pembangunan periferi dalam politik partisipasi bermakna.

Inklusi sosial adalah *value* yang digunakan sebagai penakar kualitas proses dan capaian pembangunan dalam setiap periode kepemimpinan. Dengan demikian, capaian pembangunan inklusi sosial bukan hanya diukur dari keterpenuhan pembangunan yang menjangkau semua warga negara, tetapi yang utama adalah bahwa tata kelola pemerintahan inklusif *(inclusive governance)* menjadi instrumen dan kerangka kerja pemerintah dalam memenuhi target-target pembangunan.

Studi ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan (1) Bagaimana kondisi kinerja dan capaian pembangunan inklusi sosial di Indonesia saat ini? (2) Bagaimana gambaran spesifik kondisi kinerja dan capaian inklusi sosial di 22 kota dan 2 kabupaten yang menjadi area penelitian? dan (3) Tantangan apa yang harus dijawab oleh pemerintah dan masyarakat guna mengefektifkan tata pemerintahan yang inklusif *(inclusive governance)* dan mengakselerasi kinerja dan capaian pembangunan di masa yang akan datang?

Studi ini ditujukan untuk menyediakan baseline data status kinerja dan capaian inklusi sosial pada tingkat nasional dan daerah; mengetahui capaian kuantitatif berbasis index atas kinerja atau proses dan capaian pembangunan inklusi sosial di tingkat nasional dan daerah; dan mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan penguatan tata kelola pemerintahan inklusif guna meningkatkan kinerja dan capaian pembangunan inklusi sosial di Indonesia. Studi inklusi sosial dapat digunakan sebagai data dasar status pencapaian agenda pembangunan inklusi sosial dan indikator capaian pembangunan. Laporan dan indeks ini bisa dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan, khususnya bagi pemerintah daerah yang sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara bagi elemen *society*, studi ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman intervensi bagi kerja-kerja agensi sosial, baik yang didukung oleh negara maupun oleh berbagai mitra pembangunan.

2. KERANGKA METODOLOGI

Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) adalah studi yang mengukur kondisi, kinerja dan capaian pemerintah baik di tingkat nasional maupun di daerah dalam menjalankan tata kelola yang inklusif guna mencapai kondisi inklusi sosial dan pemenuhan hak-hak warga negara, yang menjadi agenda pembangunan nasional. Studi ini mendasarkan diri pada paradigma HAM dan hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana dijamin UUD Negara RI 1945, serta ditujukan untuk mendorong kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang sebagai pemangku hak *(rights holders)* untuk memperoleh jaminan dan menikmati hak-hak asasi manusia dari kewajiban yang dijalankan oleh negara sebagai pemangku kewajiban *(duty bearer)* untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi

hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) adalah penelitian semi komposit dengan pendekatan campuran (*mix method*), yakni gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sebagai studi pengukuran, semua data kuantitatif dan kualitatif pada akhirnya akan disajikan dalam bentuk skor yang disertai pembobotan.

Sebagai studi pengukuran pertama, SETARA Institute akan mempelajari secara lebih detail kondisi inklusi di 22 kota dan 2 kabupaten, yaitu: Kota Ambon, Balikpapan, Bandung, Bengkulu, Blitar, Denpasar, Gunungsitoli, Jakarta Selatan, Kendari, Kupang, Makassar, Padang, Palangkaraya, Palembang, Parepare, Kota Probolinggo, Samarinda, Semarang, Sorong, Tangerang, Tanjungpinang, Ternate, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini dilakukan pada Agustus 2024-Januari 2025.

Kelompok subjek pembangunan yang di teliti dalam studi inklusi sosial ini adalah perempuan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas agama/ kepercayaan, dan kelompok masyarakat adat.

IISI mendefinisikan inklusi sosial sebagai sebuah proses dan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mendapatkan akomodasi peluang dan sumber daya, serta berpartisipasi secara bermakna di seluruh dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan masyarakat.

Mengacu pada prinsip HAM dan jaminan hak konstitusional warga sebagaimana dijamin UUD Negara RI 1945, IISI menetapkan dua variabel utama: variabel approach/ pendekatan/proses dan upaya meningkatkan inklusi sosial dan variabel aspirasional yang menunjuk pada capaian-capaian hak yang harus dicapai dalam suatu pembangunan.

Gambar 1
Adopsi Hak Konstitusional Warga dalam Indikator IISI

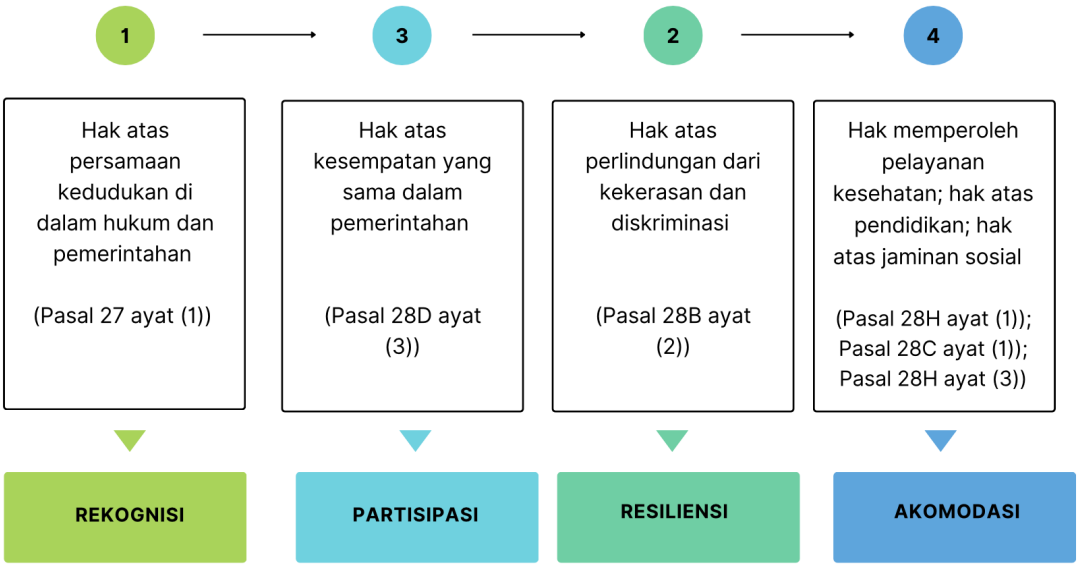

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Pada variabel approach, hak-hak konstitusional warga yang dijamin dalam UUD Negara RI 1945 disarikan menjadi prinsip pendekatan (variabel approach) yang diturunkan menjadi 4 indikator adalah: kondisi rekognisi pemerintah terhadap kelompok rentan, upaya pemerintah dalam mendorong resiliensi kelompok rentan, langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan, serta langkah konkret pemerintah dalam memastikan terwujudnya akomodasi yang layak dan keterjangkauan atau aksesibilitas bagi kelompok rentan agar dapat beraktivitas secara mandiri dan berpartisipasi penuh dan bermakna.

Pada variabel aspirasional, studi IISI menganalisis kualitas pemanfaatan hak-hak kelompok rentan atau capaian pemenuhan hak dengan mengukur pemenuhan 7 (tujuh) hak: yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas ekonomi, hak atas keamanan pribadi, hak atas lingkungan yang layak, hak atas kebudayaan, dan hak atas pekerjaan yang layak.

Dengan demikian, pengukuran dalam studi IISI ini menggunakan 2 (dua) variabel dengan 11 (sebelas) indikator, yaitu 7 (tujuh) indikator pada variabel aspirasional dan 4 (empat) indikator pada variabel pendekatan. Selanjutnya 11 (sebelas) indikator tersebut diturunkan ke dalam 39 sub-indikator sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1
2 (dua) Variabel, 11 (sebelas) Indikator, dan 39 (tiga puluh sembilan) sub-Indikator IISI

Variabel dan Indikator	Sub Indikator & Data Ukur
A. Variabel Aspirasional	
1. Hak atas Kesehatan	1.1 Angka Kematian Ibu 1.2 Angka Kematian Bayi 1.3 Indeks Ketimpangan Gender 1.4 Indeks Pembangunan Gender
2. Hak atas Pendidikan	2.1 Angka Partisipasi Sekolah 2.2 Angka Partisipasi Kasar 2.3 Angka Buta Aksara
3. Hak atas Ekonomi	3.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 3.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan 3.3 Indeks Keparahan Kemiskinan
4. Hak atas keamanan pribadi	4.1 Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak 4.2 Statistik Kriminal BPS

Variabel dan Indikator	Sub Indikator & Data Ukur
5. Hak atas lingkungan yang layak	5.1 Laju Deforestasi Indonesia 5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 5.3 Indeks Kualitas Air 5.4 Indeks Kualitas Udara
6. Hak atas kebudayaan	6.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan
7. Hak atas pekerjaan yang layak	7.1 Tingkat Pengangguran Terbuka 7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 7.3 Persentase Tenaga Kerja 7.4 Rasio Kewirausahaan Nasional
B. Variabel Pendekatan	
1. Rekognisi	1.1 Pengakuan dalam Kebijakan Daerah 1.2 Pengakuan dalam Masyarakat Sosial 1.3 Penyusunan kebijakan berbasis bukti 1.4 Penggunaan pengalaman komunitas ter-dampak dalam penyusunan kebijakan
2. Partisipasi	2.1 Kegiatan sosial 2.2 Partisipasi dalam Pekerjaan 2.3 Kesempatan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan 2.4 Politik 2.5 Komunitas 2.6 Agensi 2.7 Berpemerintahan 2.8 Daya Dukung Sosial
3. Resiliensi	3.1 Kondisi ketersediaan mekanisme prevensi 3.2 Kondisi ketersediaan mekanisme proteksi 3.3 Kondisi ketersediaan mekanisme pemulihan 3.4 Kesinambungan program target group
4. Akomodasi	4.1 Akomodasi dan aksesabilitas pemanfaatan layanan publik 4.2 Pemerataan terhadap ekonomi sosial budaya

Untuk mengetahui kondisi inklusi sosial SETARA Institute menetapkan tiga jenis data utama yang akan diukur: (1) kebijakan baik dalam bentuk legislasi nasional, regulasi daerah dan produk hukum daerah lainnya, termasuk produk hukum yang memuat perencanaan pembangunan; (2) program atau agenda pembangunan nasional dan

daerah; (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan (4) peta daya dukung sosial terhadap agenda pembangunan inklusi sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: *desk review* atau studi dokumen, wawancara *(indepth interview),* dan kuesioner *self-assessment* yang ditujukan bagi pemerintah daerah.

Analisis Data dan Pembobotan indikator dan scoring diakukan pengisian rubrik-rubrik yang sangat detail dari setiap indikator, sub-indikator, dan cakupan kelompok sosial yang menjadi fokus studi. Berdasarkan data dalam rubrik dan deskripsi keterpenuhan-ketidakterpenuhan hak yang menjadi dasar *scoring* menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1-7 yang menggambarkan rentang gradatif dengan nilai 1 (satu) untuk kondisi inklusi sosial sangat buruk dan 7 (tujuh) untuk kondisi inklusi sosial sangat baik.

Tabel 2
Pembobotan dan Scoring

Variabel	Indikator	Bobot	Scoring	
			Skala Likert	Keterangan
Aspirasional	Hak atas Kesehatan	10 %	1	Diabaikan (*Negligible*)
	Hak atas Pendidikan	10 %	2	Tidak signifikan (*Insignificant*)
	Hak atas Ekonomi	10 %	3	Sederhana (*Basic*)
	Hak atas Keamanan Pribadi	10 %	4	Berkembang (*Improving*)
	Hak atas Lingkungan yang Layak	5 %	5	Terbentuk (*Established*)
	Hak atas Kebudayaan	5 %	6	Maju (*Mature*)
	Hak atas Pekerjaan yang Layak	10 %	7	Terdepan (*Leading*)
Pendekatan	Rekognisi	10 %		
	Partisipasi	10 %		
	Resiliensi	10 %		
	Akomodasi	10 %		

Untuk menguji dan menjamin validitas data dan hasil *scoring*, penelitian ini melakukan tiga teknik uji validitas sekaligus, yakni (1) triangulasi sumber, (2) kuesioner *self-assessment,* dan (3) *expert meeting series* atau pertemuan serial para ahli untuk memberikan *judgement.*

Sebagai studi perdana, IISI memiliki keterbatasan, khususnya pada jangkauan wilayah, yang memang hanya ditujukan pada 24 kota/kabupaten sebagai *piloting* studi. Keterbtasan yang dideklarasikan juga menyangkut bahwa tren inklusi sosial bukanlah akumulasi gambaran dari kondisi inklusi sosial di seluruh daerah-daerah di Indonesia, dengan kata lain, skor IISI nasional bukan akumulasi skor daerah yang diteliti. Deklarasi keterbatasan juga ditujukan pada keterjangkauan dan ketersediaan data di daerah yang bisa diakses oleh peneliti, ketidaktersediaan data terpilah dalam statistik daerah yang menjawab kebutuhan IISI, dan subjektivitas pembacaan data kualitatif, sangat dimungkinkan terjadi.

3. KONDISI INKLUSI SOSIAL INDONESIA

3.1 Skor dan Rata-Rata Nasional

Studi IISI membukukan skor rata-rata untuk inklusi sosial di tingkat nasional sebesar 3,2 poin yang berarti bahwa kondisi inklusi sosial pada tingkat nasional berada pada status *basic to improving.* Status ini menggambarkan bahwa di tingkat nasional terdapat beberapa progresi yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat, namun terdapat pula beberapa catatan sebagai koreksi yang membutuhkan peningkatan yang lebih holistik dalam menciptakan situasi yang lebih inklusif. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa skor rata-rata yang dihasilkan pada data nasional ini bukan merupakan rata-rata skor dari 24 daerah penelitian, melainkan rata-rata dari variabel aspirasional dan variabel pendekatan yang diperoleh dari data-data yang mengindikasikan situasi inklusi di tingkat nasional.

Tabel 3
Skor IISI di Tingkat Nasional Variabel Aspirasional

No.	Indikator	Sub-Indikator	Skor
A. Variabel Aspirasional			**3.3**
1.	Hak atas Kesehatan	Angka Kematian Ibu	3,3
		Angka Kematian Bayi	
		Indeks Ketimpangan Gender	
		Indeks Pembangunan Gender	

2.	Hak atas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	3,5
		Angka Partisipasi Kasar	
		Angka Buta Aksara	
3.	Hak atas ekonomi	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,5
		Indeks Keparahan Kemiskinan	

No.	Indikator	Sub-Indikator	Skor
A. Variabel Aspirasional			**3.3**
4.	Hak atas keamanan pribadi	Indeks Demokrasi Indonesia	3,2
		Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak	
		Statistik Kriminal	
		Jumlah kejahatan siber	
5.	Hak atas lingkungan yang layak	Laju Deforestasi Indonesia	3,0
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
6.	Hak atas kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	3,2
7.	Hak atas pekerjaan yang layak	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,4
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	

Tabel 4
Skor IISI di Tingkat Nasional Variabel Pendekatan

B. Variabel Pendekatan						**3.1**
No.	**Indikator**	**Sub-Indikator**	**Subjek Penelitian**			
			Perempuan	**Disabilitas**	**Minoritas Agama/ Kepercayaan**	**Masyarakat Adat**
1.	Rekognisi	Pengakuan dalam Kebijakan Daerah	4.0	4.0	3,4	1,5
		Pengakuan dalam Masyarakat Sosial	4.0	4.0	3,4	3,2
		Penyusunan kebijakan berbasis bukti	4.0	3,7	3,0	1,5
		Penggunaan pengalaman komunitas terdampak dalam penyusunan kebijakan	4.0	3.7	2.9	1.5

B. Variabel Pendekatan						3.1
No.	Indikator	Sub-Indikator	Subjek Penelitian			
			Perempuan	Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
2.	Partisipasi	Partisipasi dalam Kegiatan sosial	4.0	3.9	3.3	2.4
		Partisipasi dalam pekerjaan	3.8	3.7	3.4	1.3
		Partisipasi dalam kesempatan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan	4.0	3.8	3.6	2.4
		Partisipasi dalam politik	3.4	3.0	3.2	1.5
		Partisipasi dalam komunitas	4.0	3.8	3.3	2.5
		Partisipasi dalam agensi	4.0	3.9	3.3	2.4
		Partisipasi dalam berpemerintahan	3.2	3.3	3.0	1.3
		Partisipasi dalam Daya Dukung Sosial	4.0	3.8	3.4	1.5
3.	Resiliensi	Kondisi ketersediaan mekanisme prevensi	3.8	3.5	3.2	1.5
		Kondisi ketersediaan mekanisme proteksi	3.8	3.5	3.2	1.4
		Kondisi ketersediaan mekanisme pemulihan	3.8	3.5	3.0	1.2
		Kesinambungan program target group	3.9	3.5	3.4	1.5
4.	Akomodasi	Akses pemanfaatan layanan publik	4.1	4.0	3.3	1.5
		Pemerataan terhadap ekonomi sosial budaya	3.8	3.7	3.5	1.5

Tabel 5
Akumulasi Skor Data Nasional Variabel Aspirasional

A.	Variabel Aspirasional	Skor
1	Hak atas kesehatan	3.3
2	Hak atas pendidikan	3.5
3	Hak atas ekonomi	3.5

4	Hak atas keamanan pribadi	3.2
5	Hak atas lingkungan yang layak	3.0
6	Hak atas kebudayaan	3.2
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.4
Rata-Rata Variabel Aspirasional Secara Keseluruhan		**3.3**

Tabel 6
Akumulasi Skor Data Nasional Variabel Pendekatan

B.	Approach Variable	Perempuan	Disabilitas	Minoritaa Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat	Skor Indikator
1	Rekognisi	4.0	3.8	3.2	1.9	3.2
2	Partisipasi	3.8	3.7	3.3	1.9	3.2
3	Resiliesi	3.8	3.5	3.2	1.4	3.0
4	Aksesabilitas	4.0	3.9	3.4	1.5	3.2
Rata-Rata Variabel Pendekatan Pada Subjek Penelitian		3.9	3.7	3.3	1.7	
Rata-Rata Variabel Pendekatan Secara Keseluruhan		**3.1**				
Rata-Rata Skor Nasional		**3.2**				

3.2 Skor dan Rata-Rata Daerah

Secara akumulatif, skor rata-rata di 24 daerah pada variabel aspirasional dan pendekatan adalah 3.3 yang berarti berada pada status *basic to improving*. Akumulasi skor daerah ini lebih tinggi 0.1 dibandingkan skor nasional yang memiliki rata-rata 3.2. Skor rata-rata daerah diambil dari 24 daerah penelitian dan tidak menggambarkan rata-rata daerah secara general di Indonesia.

Tabel 7
Skor Akumulatif Indeks Inklusi Sosial di Daerah

I	Variabel Aspirasional	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Minoritas Agama/ Kepercayaan	Masyarakat Adat
1	Hak atas kesehatan	3.2	2.9	3.6	3.3
2	Hak atas pendidikan	3.5	3.3	3.5	3.1
3	Hak atas ekonomi	3.4	3.0	3.5	3.2
4	Hak atas keamanan pribadi	3.0	2.7	3.1	3.1

5	Hak atas lingkungan yang layak	3.4	3.0	3.3	3.3
6	Hak atas kebudayaan	3.5	3.2	3.4	3.6
7	Hak atas pekerjaan yang layak	3.3	2.7	3.4	3.4
Rata-Rata Variabel 1		**3.3**	**3.0**	**3.4**	**3.3**
II	**Variabel Pendekatan**	**Perempuan**	**Penyandang Disabilitas**	**Minoritas Agama/ Kepercayaan**	**Masyarakat Adat**
1	Rekognisi	3.7	3.5	3.5	3.6
2	Partisipasi	3.6	3.1	3.5	3.3
3	Resiliensi	3.5	3.1	3.4	3.0
4	Akomodasi	3.5	3.4	3.6	3.3
	Rata-Rata Variabel 2	**3.6**	**3.3**	**3.5**	**3.3**
	Rata-Rata Skor Keseluruhan	**3.5**	**3.1**	**3.5**	**3.3**
	Rata-Rata Skor Daerah	**3.3**			

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Sekalipun skor daerah dan skor nasional sama-sama berada pada status *basic to improving*, namun lebih rendahnya skor rata-rata nasional dibandingkan skor daerah menandakan bahwa agenda pembangunan inklusi sosial yang menjadi komitmen pemerintah pusat justru belum sepenuhnya diartikulasikan secara optimal oleh pemangku kepentingan di tingkat nasional. Sementara dari sigi ke 24 daerah, daerah-daerah mulai bergegas dalam membangun ekosistem yang kondusif terhadap kelompok rentan menuju inklusi sosial lebih *established*.

Selain memberikan skor akumulasi dari keseluruhan indikator, penelitian ini juga mengklasifikasikan skor secara rinci terhadap 22 Kota dan 2 Kabupaten. Skor per daerah penelitian ini berdasarkan variabel dan mengacu pada masing-masing subjek penelitian. disajikan sebagai berikut:

Tabel 8
Skor Hak Kesehatan

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	2.8	2.5	3.5	3.0
Kota Sorong	2.8	2.5	3.5	3.7
Palembang	3.5	3.0	3.5	-
Tangerang	3.5	3.0	3.7	-
Kendari	3.0	2.5	3.5	3.5

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Semarang	3.5	3.0	3.5	-
Kupang	3.0	2.5	3.5	-
Blitar	2.9	2.5	3.5	-
Palangkaraya	3.5	3.0	3.5	3.3
Tanjung Pinang	3.0	2.8	3.4	3.0
Jakarta Selatan	3.9	3.8	3.9	-
Bengkulu	3.0	2.9	3.3	3.0
Ambon	3.0	2.8	3.7	3.2
Ternate	3.0	2.7	3.7	3.0
Bandung	3.5	3.0	3.8	-
Padang	3.5	3.0	3.7	-
Denpasar	3.5	3.0	3.7	3.7
Balikpapan	3.5	3.0	3.7	-
Kab. Lombok Timur	3.4	2.7	3.8	3.6
Kota Probolinggo	3.3	3.0	3.7	-
Kabupaten Probolinggo	3.0	2.7	3.5	3.3
Kota Makassar	3.3	3.0	3.6	3.5
Samarinda	3.0	2.9	3.7	-
Parepare	3.3	3.0	3.2	-
Rata-Rata	**3.2**	**2.9**	**3.6**	**3.3**

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Keterangan: Tidak semua daerah yang menjadi lokasi penelitian terdapat kelompok masyarakat adat. Dari 24 daerah, 12 diantaranya terdapt kelompok masyarakat adat.

Tabel 9
Skor Hak Atas Pendidikan

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	3.0	2.7	3.3	2.9
Kota Sorong	3.0	2.7	3.0	3.0
Palembang	3.8	3.5	3.7	-

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Tangerang	3.9	3.7	3.8	-
Kendari	3.7	3.4	3.6	3.5
Semarang	3.9	3.5	4.0	-
Kupang	3.5	3.3	3.5	-
Blitar	3.3	3.1	3.4	-
Palangkaraya	3.0	2.7	3.0	3.3
Tanjung Pinang	3.5	3.3	3.4	3.0
Jakarta Selatan	3.9	3.7	3.9	-
Bengkulu	3.7	3.4	3.3	3.0
Ambon	3.2	3.0	3.4	3.2
Ternate	3.1	2.9	3.2	3.0
Bandung	3.8	3.6	4.0	-
Padang	3.7	3.5	3.7	-
Denpasar	3.8	3.6	3.8	3.4
Balikpapan	3.8	3.6	3.5	-
Kab. Lombok Timur	3.0	2.8	3.0	2.7
Kota Probolinggo	3.7	3.6	3.5	-
Kabupaten Probolinggo	3.5	3.3	3.4	3.2
Kota Makassar	3.7	3.5	3.8	3.3
Samarinda	3.7	3.5	3.7	-
Parepare	3.5	3.5	3.4	-
Rata-rata	**3.5**	**3.3**	**3.5**	**3.1**

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 10
Skor Hak atas Ekonomi

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	2.8	2.3	3.0	3.1
Kota Sorong	2.8	2.3	3.0	3.5
Palembang	3.5	3.3	3.5	-
Tangerang	3.8	3.5	3.8	-
Kendari	3.5	3.2	3.5	3.7
Semarang	3.7	3.5	3.7	-

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Kupang	3.4	3.0	3.4	-
Blitar	3.3	3.0	3.5	-
Palangkaraya	3.4	3.1	3.4	3.1
Tanjung Pinang	3.2	3.0	3.2	3.2
Jakarta Selatan	3.8	3.5	3.8	-
Bengkulu	3.4	3.1	3.4	3.0
Ambon	3.0	2.5	3.5	3.3
Ternate	3.0	2.5	3.5	3.0
Bandung	3.8	3.3	3.8	-
Padang	3.8	3.5	3.8	-
Denpasar	3.2	3.1	3.8	3.0
Balikpapan	3.5	3.2	3.5	-
Kab. Lombok Timur	3.0	3.0	3.4	3.0
Kota Probolinggo	3.5	3.2	3.5	-
Kabupaten Probolinggo	3.1	2.8	3.3	3.0
Kota Makassar	3.5	3.0	3.5	3.2
Samarinda	3.3	3.0	3.3	-
Parepare	3.1	2.8	3.1	-
Total Rata-Rata	**3.4**	**3.0**	**3.5**	**3.2**

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 11
Hak atas Keamanan Pribadi

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	3.0	2.7	2.9	3.2
Kota Sorong	2.7	2.6	2.9	3.2
Palembang	3.5	3.0	3.0	-
Tangerang	2.5	2.3	3.0	-
Kendari	3.0	2.7	2.7	3.1
Semarang	3.0	2.7	4.0	-
Kupang	3.0	2.7	4.0	-
Blitar	2.9	2.6	2.9	-

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Palangkaraya	3.0	2.7	2.9	3.0
Tanjung Pinang	3.0	2.7	3.0	3.0
Jakarta Selatan	3.0	2.7	3.0	-
Bengkulu	3.0	2.7	3.0	3.0
Ambon	2.7	2.5	3.5	3.2
Ternate	3.5	3.0	3.1	3.2
Bandung	3.0	2.7	3.5	-
Padang	3.0	2.7	3.0	-
Denpasar	3.0	2.7	3.0	3.0
Balikpapan	3.0	2.7	3.0	-
Kab. Lombok Timur	2.8	2.6	2.9	2.6
Kota Probolinggo	2.9	2.7	2.9	-
Kabupaten Probolinggo	3.0	2.8	3.0	3.0
Kota Makassar	2.7	2.6	2.5	3.2
Samarinda	3.0	2.8	3.0	-
Parepare	3.0	2.7	3.0	-
Rata-rata	**3.0**	**2.7**	**3.1**	**3.1**

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 12
Hak atas Lingkungan yang Layak

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	3.6	3.0	3.2	3.5
Kota Sorong	3.5	2.8	3.7	3.7
Palembang	3.0	2.9	3.2	-
Tangerang	2.8	2.7	3.1	-
Kendari	3.3	3.0	3.4	3.5
Semarang	3.0	2.9	3.2	-
Kupang	3.0	2.7	3.0	-
Blitar	3.2	3.0	3.3	-
Palangkaraya	3.8	3.0	3.6	3.3
Tanjung Pinang	3.5	3.3	3.5	3.3
Jakarta Selatan	3.0	2.9	3.4	-

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Bengkulu	3.5	3.0	3.3	3.3
Ambon	3.8	3.0	3.4	3.4
Ternate	3.8	2.7	3.7	3.5
Bandung	3.6	3.0	3.4	-
Padang	3.7	3.0	3.4	-
Denpasar	3.6	3.2	3.4	3.0
Balikpapan	3.2	3.0	3.3	-
Kab. Lombok Timur	3	2.9	3.4	2.8
Kota Probolinggo	3.5	3.5	3.4	-
Kabupaten Probolinggo	3.6	3.4	3.3	3.1
Kota Makassar	3.4	3.0	3.3	3.2
Samarinda	3.5	3.0	3.2	-
Parepare	3.2	3.1	3.1	-
Rata-Rata	**3.4**	**3.0**	**3.3**	**3.3**

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 13
Hak atas Kebudayaan

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	3.4	3.2	3.6	3.7
Kota Sorong	3.4	3.2	3.7	3.8
Palembang	3.3	3.1	3.5	-
Tangerang	3.0	3.0	3.0	-
Kendari	3.4	3.2	3.6	3.7
Semarang	3.5	3.2	3.3	-
Kupang	3.4	3.2	3.4	-
Blitar	3.4	3.0	3.4	-
Palangkaraya	3.4	3.1	3.3	3.6
Tanjung Pinang	3.4	3.2	3.3	3.4
Jakarta Selatan	3.5	3.5	3.5	-
Bengkulu	3.4	3.2	3.0	3.4
Ambon	3.5	3.1	3.8	3.8

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Ternate	3.7	3.2	3.8	3.8
Bandung	3.5	3.2	3.7	-
Padang	3.4	3.1	3.4	-
Denpasar	3.9	3.2	3.8	3.9
Balikpapan	3.7	3.3	3.3	-
Kab. Lombok Timur	3.8	3.2	3.4	3.8
Kota Probolinggo	3.3	3.1	3.2	-
Kabupaten Probolinggo	3.7	3.2	3.4	3.3
Kota Makassar	3.6	3.2	3.3	3.2
Samarinda	3.5	3.1	3.4	-
Parepare	3.2	3.0	3.1	-
Rata-rata	**3.5**	**3.2**	**3.4**	**3.6**

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 14
Hak atas Pekerjaan yang Layak

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Gunung Sitoli	2.7	2.6	3.4	3.5
Kota Sorong	2.5	2.4	3.8	3.6
Palembang	3.2	2.9	3.0	-
Tangerang	3.6	2.8	3.4	-
Kendari	3.0	2.5	3.3	3.4
Semarang	3.4	2.9	3.2	-
Kupang	3.3	2.7	3.3	-
Blitar	3.3	2.8	3.3	-
Palangkaraya	3.2	2.7	3.3	3.4
Tanjung Pinang	3.2	2.6	3.3	3.4
Jakarta Selatan	3.5	3.5	3.5	-
Bengkulu	3.3	2.7	3.3	3.3
Ambon	3.2	2.5	3.6	3.4
Ternate	3.4	2.5	3.8	3.4
Bandung	3.5	2.7	3.7	-
Padang	3.4	2.7	3.5	-

Nama Daerah	Perempuan	Disabilitas	Minoritas agama/ kepercayaan	Masyarakat adat
Denpasar	3.5	2.8	3.5	3.7
Balikpapan	3.4	2.6	3.4	
Kab. Lombok Timur	3.1	2.8	3.3	3.0
Kota Probolinggo	3.3	2.8	3.4	-
Kabupaten Probolinggo	3.3	2.7	3.4	3.3
Kota Makassar	3.4	2.8	3.4	3.2
Samarinda	3.3	2.8	3.3	-
Parepare	3.2	2.7	3.2	-
Rata-rata	**3.3**	**2.7**	**3.4**	**3.4**

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 15
Skor Inklusi Sosial Kelompok Perempuan

Nama Daerah	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi	Score akhir
Gunung Sitoli	3.0	3.5	3.0	3.5	3.3
Sorong	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Palembang	3.8	3.0	3.5	3.0	3.3
Tangerang	3.5	4.5	3.5	3.0	3.6
Kendari	3.5	3.5	3.5	4.0	3.6
Semarang	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0
Kupang	3.5	4.0	4.0	3.5	3.8
Blitar	3.8	3.0	3.5	3.5	3.5
Palangkaraya	3.0	3.5	3.7	3.5	3.4
Tanjung Pinang	3.8	3.3	3.2	3.5	3.5
Jakarta Selatan	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Bengkulu	3.5	3.0	3.0	3.0	3.1
Ambon	3.9	3.6	3.7	3.7	3.7
Ternate	4.0	3.5	3.5	3.7	3.7
Bandung	4.0	4.0	4.0	3.7	3.9
Padang	4.0	4.0	3.0	3.6	3.7
Denpasar	3.5	3.5	4.0	4.0	3.8
Balikpapan	3.5	3.8	3.5	3.8	3.7
Kabupaten Lombok Timur	4.3	3.0	3.4	3.3	3.7

Nama Daerah	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi	Score akhir
Kota Probolinggo	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7
Kabupaten Probolinggo	3.5	3.6	3.4	3.5	3.5
Kota Makassar	3.5	3.5	3.0	3.5	3.4
Samarinda	3.8	3.5	3.0	3.5	3.5
Parepare	3.9	3.7	3.7	3.8	3.8
Rata-rata	**3.7**	**3.6**	**3.5**	**3.5**	**3.6**

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 16
Skor Inklusi Sosial Kelompok Penyandang Disabilitas

Nama Daerah	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi	Jumlah
Gunung Sitoli	3.8	2.8	3.0	2.5	3.0
Sorong	2.9	2.6	2.5	3.5	2.9
Palembang	3.6	3.0	2.5	3.0	3.0
Tangerang	3.7	4.0	3.0	4.0	3.7
Kendari	3.4	2.8	3.0	3.0	3.1
Semarang	3.7	3.9	3.9	3.5	3.8
Kupang	3.8	3.1	3.9	3.5	3.6
Blitar	3.4	2.8	2.5	3.5	3.1
Palangkaraya	3.8	3.0	3.0	3.2	3.3
Tanjung Pinang	3.3	2.7	2.5	3.0	2.9
Jakarta Selatan	3.7	3.8	3.4	3.8	3.7
Bengkulu	3.0	2.4	3.0	3.0	2.9
Ambon	3.4	3.0	3.5	3.5	3.4
Ternate	3.6	3.0	3.0	2.4	3.0
Bandung	3.0	3.2	3.5	4.0	3.4
Padang	3.4	2.6	2.5	3.7	3.1
Denpasar	3.9	3.4	3.5	3.9	3.7
Balikpapan	3.4	3.0	3.0	3.5	3.2
Kab. Lombok Timur	3.5	3.1	3.0	3.0	3.2
Kota Probolinggo	3.8	3.3	3.0	3.8	3.5
Kabupaten Probolinggo	3.4	3.0	3.0	3.0	3.1
Kota Makassar	3.4	2.8	2.5	4.0	3.2
Samarinda	3.4	2.5	3.0	3.0	3.0

Parepare	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5
Rata-rata	**3.5**	**3.1**	**3.1**	**3.4**	**3.2**

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 17
Skor Inklusi Sosial Kelompok Minoritas Agama/Kepercayaan

Nama Daerah	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi	Jumlah
Gunung Sitoli	3.5	3.2	3.3	3.7	3.4
Kota Sorong	3.5	3.9	3.9	3.0	3.6
Palembang	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0
Tangerang	3.5	3.0	3.0	3.0	3.1
Kendari	3.5	3.5	4.0	4.0	3.8
Semarang	4.0	3.8	4.0	4.0	4.0
Kupang	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Blitar	3.5	3.0	3.5	4.0	3.5
Palangkaraya	4.0	3.5	3.5	3.0	3.5
Tanjung Pinang	3.5	3.0	3.0	3.0	3.1
Jakarta Selatan	2.9	3.4	3.5	3.4	3.3
Bengkulu	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Ambon	4.0	3.0	3.5	3.5	3.5
Ternate	3.5	3.5	3.0	4.0	3.5
Bandung	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0
Padang	3.0	4.0	3.0	4.0	3.5
Denpasar	3.5	4.0	3.5	4.5	3.9
Balikpapan	3.5	4.0	3.5	4.5	3.9
Kab. Lombok Timur	3.5	3.5	3.0	3.5	3.4
Kota Probolinggo	3.2	3.4	3.3	3.4	3.3
Kabupaten Probolinggo	3.2	3.4	3.2	3.3	3.3
Kota Makassar	3.0	3.5	3.2	3.5	3.3
Samarinda	3.0	3.0	3.0	3.3	3.1
Parepare	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Rata-rata	**3.5**	**3.5**	**3.4**	**3.6**	**3.5**

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Tabel 19
Skor Inklusi Sosial Masyarakat Adat di 12 Daerah

Nama Daerah	Rekognisi	Partisipasi	Resiliensi	Akomodasi	Jumlah
Gunung Sitoli	4.0	3.0	3.0	3.0	3.3
Kota Sorong	3.5	3.8	3.6	3.0	3.5
Kendari	3.5	3.5	3.0	3.0	3.3
Kabupaten Probolinggo	3.2	3.0	2.5	3.0	2.9
Palangkaraya	3.7	3.0	3.0	3.0	3.2
Tanjung Pinang	3.5	3.5	2.5	2.7	3.1
Bengkulu	3.6	3.0	3.0	3.1	3.2
Ambon	3.7	3.5	3.0	3.0	3.3
Ternate	3.7	3.0	3.0	3.0	3.2
Denpasar	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Makassar	3.2	3.0	2.5	3.0	2.9
Kabupaten Lombok Timur	3.3	3.2	3.0	3.0	3.1
Rata-rata	**3.6**	**3.3**	**3.0**	**3.3**	**3.3**

Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025

Selain pengukuran berbasis kinerja dan capaian, IISI juga mencatat jejak pemajuan inklusi sosial di daerah, yaitu:

1. Terdapat 41 kebijakan daerah yang promotif pada peningkatan inklusi sosial bagi perempuan melalui agenda mainstreaming perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam visi dan kebijakan daerah.
2. Kolaborasi Pemerintah Pusat-Daerah dalam akselerasi implementasi Pengarusutamaan Gender
3. Terdapat 29 kebijakan daerah yang promotif pada peningkatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas melalui mainstreaming komitmen dan jaminan hak penyandang disabilitas dalam visi dan kebijakan daerah
4. Progresi dalam peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan
5. Terdapat lebih dari 36.000 satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di berbagai daerah.
6. Peningkatan inklusi terhadap penghayat kepercayaan.
7. Bertumbuhnya kepemimpinan dan partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung ekosistem toleransi di daerah.
8. Mainstreaming produk hukum promotif terhadap pemajuan toleransi di tingkat daerah
9. Pemberdayaan masyarakat adat di sektor ekowisata

IISI juga mencatat tantangan dalam penyelenggaraan inklusi sosial pada masing-masing subjek penelitian, yaitu:

1. Inkonsistensi implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender
2. Pemahaman tradisional pemerintah daerah terhadap partisipasi perempuan
3. Mandeknya pembangunan sarana dan prasarana serta minimnya ketersediaan Juru Bahasa Isyarat
4. Rendahnya *meaningful participation* penyandang disabilitas dalam proses strategis berpemerintahan
5. Minimnya akseptasi terhadap kelompok minoritas agama/kepercayaan pada level formal struktural
6. Kondisi stagnasi menuju regresi dalam kebebasan beragama/ berkeyakinan
7. Rekognisi seremonial yang tidak didukung dengan peningkatan partisipasi yang bermakna

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1. Kesimpulan

Konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan terhadap penghormatan *(to respect)*, pelindungan *(to protect)*, dan pemenuhan *(to fullfil)* hak-hak Konstitusional warga negara. Jaminan tersebut pada level daerah diterjemahkan melalui berbagai peraturan tingkat daerah untuk memastikan implementasi jaminan tersebut berlangsung paripurna dan selaras dengan amanat Konstitusi. Selain itu, konsepsi demokrasi juga memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Prinsip kesetaraan dalam demokrasi menempatkan tiap-tiap orang berada pada posisi yang setara, serta memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Prinsip tersebut pada dasarnya meniadakan istilah warga negara ”kelas dua” maupun implementasi terminologi ”mayoritas-minoritas” dalam pelayanan publik maupun partisipasi warga negara, yang dikelola dengan software *inclusive governance*, dan secara teknokratik telah menjadi mantra perencanaan pembangunan jangka panjang.

Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) dengan menggunakan data ukur yang mencakup kebijakan, anggaran, program, dan daya dukung sosial menunjukkan bahwa kondisi inklusi sosial baik di tingkat nasional maupun di 24 daerah belum menggambarkan keterpenuhan mandat Konstitusi dan HAM.

Skor rata-rata untuk inklusi sosial di tingkat nasional berada pada angka 3,2 poin, yang berarti masuk dalam status *basic* to *improving.* Artinya, ada beberapa progresi yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat, namun terdapat pula tantangan yang

menuntut penyikapan sistemik. Baik pada variabel aspirasional maupun pada variabel pendekatan, capaian dan kinerja inklusi sosial di tingkat nasional sama-sama belum mencapai angka moderat yaitu 4 dengan skala 1-7.

Sementara pada tingkat daerah, secara akumulatif skor rata-rata di 24 daerah pada variabel aspirasional dan pendekatan adalah 3.3. Akumulasi skor daerah ini lebih tinggi 0.1 dibandingkan skor nasional yang memiliki rata-rata 3.2. Sekalipun skor daerah dan skor nasional sama-sama berada pada status *basic to improving,* namun lebih rendahnya skor rata-rata nasional dibanding skor di 24 daerah karena mandat implementasi operasional kebijakan-kebijakan pemerintah pusat sebagian besarnya justru melekat di daerah dalam paket kebijakan otonomi daerah. Selain itu, secara metodologis, gambaran dari 22 daerah dan 2 kabupaten tidak dijadikan dasar akumulasi skor pada tingkat nasional.

Namun demikian, masih terkategori rendahnya akumulasi skor inklusi sosial pada tingkat nasional maupun daerah, serta belum sinergisnya 3 lapis kepemimpinan penopang ekosistem inklusi sosial, tentu bukan berarti tidak adanya terobosan serta kabar baik. Pada level Kementerian/Lembaga yang mewujudkan inklusi sosial tersebut melalui akomodasi yang layak dan kemudahan aksesibilitas kelompok rentan untuk menjangkau akses-akses layanan publik maupun akses ekonomi. Begitu pun di institusi Polri yang gencar melakukan Pengarusutamaan Gender, bahkan hingga level rekrutmen dan pelembagaan peran dengan membentuk direktorat baru di tubuh Polri.

Sementara pada level daerah, kabar baik tersebut di antaranya hadir melalui *mainstreaming* perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam visi dan kebijakan daerah yang terlihat melalui temuan 42 kebijakan daerah yang promotif pada peningkatan inklusi sosial terhadap Perempuan. Begitupun mainstreaming perhatian dan jaminan hak penyandang disabilitas dalam visi dan kebijakan daerah melalui 29 kebijakan daerah yang promotif pada peningkatan inklusi sosial terhadap penyandang disabilitas.

Dengan skor dan gambaran progresi-regresi kebijakan inklusi sosial sebagaimana digambarkan di atas seungguhnya tantangan pemajuan inklusi sosial di Indonesia masih menuntut akselerasi. Bukan hanya diikat dengan perencanaan pembangunan yang termaktub dalam berbagai dokumen perencanaan, tetapi yang utama adalah konsistensi dan komitmen pada pemajuan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. SETARA Instiute mengidentifikasi urgensi pembentukan ekosistem inklusi sosial dengan memusatkan perhatian pada 3 (tiga) faktor kepemimpinan yang memengaruhi kinerja dan capaian inklusi sosial di suatu daerah. Tiga jenis kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan politik *(political leadership)*, kepemimpinan birokrasi *(bureaucratic leadership),* dan kepemimpinan sosial *(societal leadership).* Analisis dan pembacaan detail atas tinggi-rendahnya skor inklusi sosial di suatu daerah dapat dimulai dengan mengkaji tiga pilar kepemimpinan ini, yang berperan penting dalam mewujudkan ekosistem inklusi sosial di tingkat daerah.

Pada konteks kepemimpinan politik, visi tentang inklusi sosial belum sepenuhnya menjadi fokus utama kepala daerah dalam agenda pembangunan di daerah. Visi-Misi kepala daerah lebih banyak berfokus pada agenda-agenda pembangunan ekonomi dan tidak meletakkan inklusi sosial sebagai prioritas interseksional yang melandasi seluruh agenda pembangunan. Positioning agenda inklusi sosial yang belum di tengah berkonsekuensi pada level kepemimpinan birokrasi, yaitu agenda-agenda yang mengarah

pada peningkatan inklusi sosial seringkali dikesampingkan untuk mengutamakan program-program yang mengarah pada kemajuan ekonomi permukaan tanpa menyentuh distribusi kesetaraan akses dan kesempatan pada semua subjek pembangunan. Demikian pula dalam hal kepemimpinan sosial, belum meluasnya pemahaman dan urgensi pembangunan inklusi sosial tidak mampu menggerakan kepemimpinan sosial menjadi penggerak dan menjadi daya dukung ekosistem inklusi sosial.

1.2. Rekomendasi

1. Presiden perlu memastikan setiap Kementerian/Lembaga disiplin dengan perencanaan pembangunan yang secara sistematis telah menyajikan agenda pembangunan inklusi sosial secara presisi. Presiden juga perlu memastikan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMN dan RPJPN yang telah ditetapkan pemerintah pusah.
2. Presiden perlu memastikan terselenggaranya tata kelola pemeirntahan inklusif *(inclusive governance)* sebagai mantra akselerasi agenda pembangunan inklusi sosial di Indonesia dengan memastikan penguatan rekognisi, resiliensi, partisipasi dan akomodasi sebagai instrumen dan pendekatan keterpenuhan hak-hak konstitusional warga.
3. Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas RI memastikan disiplin perencanaan pembangunan daerah mewujudkan RPJMD yang inklusif pada selurh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota hasil Pilkada serentak 2024.
4. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM perlu melakukan peninjauan ulang terhadap produk hukum daerah yang diskriminatif dan tidak kondusif terhadap tata kehidupan yang inklusif, baik produk hukum daerah terdahulu maupun produk hukum daerah yang terbit dalam beberapa tahun terakhir. Aneka produk hukum tersebut tersebut nyata-nyata menjadi landasan pacu tumbuh suburnya praktik diskriminasi, baik dilakukan aktor negara maupun non-negara.
5. Pemerintah pusat perlu mendesain dan menerbitkan peraturan di tingkat nasional, seperti Peraturan Presiden, yang menjadi rujukan Kabupaten-Kota dalam membuat peraturan untuk memastikan kokohnya kerangka hukum pemajuan inklusi sosial di daerah. Tata kelola pemerintahan inklusif (*inclusive governance*) didorong sebagai prinsip utama dalam menjawab tantangan virus eksklusi sosial dan diskriminasi yang berada pada lapis negara maupun non-negara.
6. Pemerintah provinsi perlu untuk terlibat aktif dalam mengorkestrasi pembangunan inklusi sosial di wilayahnya, baik level kota maupun kabupaten. Produk hukum yang promotif terhadap inklusi sosial pada tingkat provinsi perlu didorong agar diadopsi menjadi produk hukum level kabupaten/kota.

Pemerintah kota dan kabupaten membangun kolaborasi berkelanjutan dengan elemen masyarakat sipil, sebagai pilar *societal leadership* untuk mewujudkan ekosistem inklusi sosial di setiap lapis komunitas dan pemerintahan.[]

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh SETARA Institute dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawabdari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.